

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan anggaran Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dimulai dengan pengumpulan usulan kegiatan. Rencana/kegiatan yang disusun untuk masing-masing departemen didasarkan pada Rencana Strategis Biro Bina Mental dan Kesejahteraan (RENSTRA) yang memberikan gambaran dan arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan, sebagai alat untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Organisasi Pemerintahan Kesekretariatan Sumatera Barat melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah. Proses penyusunan anggaran Biro Bina Mental dan Kesejahteraan mulai dari penyusunan RKPD, KUA, PPAS, SE penyusunan RKA, RKA-SPKD, RKA-PPKD hingga pedoman DPA-SKPD.
2. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Kesekretariatan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan

anggarannya adalah mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD kota yang kemudian dituangkan dalam RENSTRA SKPD; Selain itu, dasar penetapan anggaran, dan metode pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Keseekretariatan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

3. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam penganggaran adalah pembuatan laporan realisasi anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran harus disertai dengan analisis komparatif antar departemen yang berbeda. Mencapai dalam periode waktu untuk memahami penyimpangan dan alasan penyimpangan ini.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang akan diajukan yang diharapkan dapat berguna bagi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Keseekretariatan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat kedepannya. Diharapkan Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat harus berkomitmen terhadap anggaran yang telah disusun sehingga, tidak ada lagi anggaran yang tidak terealisasi kedepannya. Diharapkan juga agar Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dapat memaksimalkan atau memanfaatkan penggunaan anggaran sehingga menjadi lebih detail dan dapat lebih baik dalam menghasilkan data yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah serta adanya transparansi anggaran untuk mengangkat citra dan martabat instansi serta memperbaiki kehidupan negara dimasa yang akan datang.

